

Konsep Doktrin Maritim dan Strategi Militer Maritim Indonesia

Oleh: Letkol Laut (P) Salim, S.E.
Kasubdit Kerjasama, Pusat Pengkajian Maritim Seskoal

“...Bahwa tradisi kuno kita ialah, agar kita menguasai lautan, bahwa negara kita hanya bisa menjadi besar dan kuat jikalau ada persatuan perhubungan penguasaan yang mutlak dari lautan” (Amanat Presiden Soekarno pada hari Armada, 1961).

Abstract

Alfred T Mahan dalam buku yang berjudul "The Influence of Sea Power upon History 1660-1753" terbit pada tahun 1890 menyebutkan betapa pentingnya peran laut sebagai aspek kekuatan sebuah bangsa. Seiring dengan keterpanggilan pembangunan maritim Indonesia sesuai dengan kodrat penciptaannya maka untuk mewujudkan TNI AL yang memiliki kemampuan World Class Navy yang memiliki lompatan pemikiran kedepan harus melakukan revolusi paradigma maritim terhadap Character of the people dan Style of government serta harus diwujudkan dalam sebuah konsep doktrin maritim dan strategi militer maritim Indonesia. Doktrin maritim harus didukung dengan kebijakan politik yang berupa penerbitan undang-undang kemaritiman atau kelautan untuk mengikat semua komponen bangsa. Demikian pula apabila Indonesia akan melaksanakan transformasi dari status negara berkembang menuju negara maju. Strategi maritim yang disusun harus mampu mengamankan aspirasi kepentingan nasional Indonesai yang masih berstatus negara berkembang. Dalam 20 sd 30 tahun ke depan, bisa jadi status Indonesia telah meningkat menjadi negara maju sehingga aspirasinya mengalami perluasan dibandingkan saat ini. Perubahan itu akan diikuti pula strategi keamanan nasionalnya, termasuk pula strategi maritim dan strategi militer maritim yang disusunnya.

Latar belakang dan pemahaman Doktrin Maritim

Berkali kali telah didengungkan bahwasannya Indonesia adalah negara maritim, namun tanpa sebuah implementasi yang jelas. Implementasi tersebut memerlukan kesamaan visi dari seluruh komponen bangsa. Visi yang sama dapat terbangun jika terjadi perubahan paradigma yang fundamental. Perubahan ini dapat mulai dilakukan dengan merumuskan sebuah doktrin maritim yang berperan sebagai

pedoman dalam penyamaan visi maritim. Setiap individu harus memahami dan menyatakan bahwa secara kodrat Indonesia lahir sebagai negara maritim baik dilihat dari konstelasi geografis maupun sejarah perjalanan bangsa. Kenyataan ini sudah tertanam sejak berabad-abad masa lampau dengan kepahlawanan rakyat Indonesia di lautan luas, jauh sebelum kedatangan kaum kolonialis Belanda. Pelaut-pelaut nusantara dapat membanggakan tradisi nenek moyang kita yang mencapai prestasi yang tinggi dalam memelihara hubungan hubungan laut dengan mengarungi samudera samudera. Kita dapat mengenang pula bahwa zaman-zaman kejayaan dalam sejarah negeri kita justru terjadi pada waktu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang keduanya mempunyai kekuatan di laut dan dapat memelihara hubungan antar pulau yang baik. Tapi perlu diperhatikan pula bahwa keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang akhirnya merosot menjadi terror bajak laut disebabkan karena kekuatan di laut tidak disertai perkembangan hubungan di daratan. Sebaliknya, Kaum imperialis Belanda dulu dapat menundukkan negeri kita karena mereka berhasil mematahkan kekuatan kita di laut dan mendesak kerajaan Mataram yang tidak mempunyai kekuatan di laut.

Untuk mewujudkan kodrat sebagai negara maritim yang kuat tersebut, bangsa Indonesia harus dibentuk menjadi insan yang berjiwa bahari atau pelaut kembali. Mutlak untuk disadari bahwa dalam membangun bangsa ini diperlukan instrumen instrumen maritim serta Angkatan Laut sebagai *military power* yang kuat, diperlukan suatu gotong royong yang kuat antar stakeholder maritim dalam *nation building* maritim¹. Sinergisme antar instansi kemaritiman dalam menggali, mengolah, dan memanfaatkan segala kekayaan laut merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan oleh negara Indonesia sebagai negara maritim yang besar. Disamping itu, Angkatan Laut sebagai instrumen utama dalam *Sea Power* harus dibangun untuk menjadi kuat guna mengamankan seluruh kegiatan instansi kemaritiman tersebut.

Doktrin merupakan suatu pedoman tata laku yang bersifat mendasar dan umum yang diyakini kebenarannya untuk menghadapi sesuatu masalah yang merupakan penerapan atau sebagai sumber dari strategi, dalam aplikasinya tergantung dari situasi yang berlaku pada saat itu. Ketika kita melihat proses terjadinya, sebuah doktrin akan berkembang melalui proses penalaran dengan

¹ Amanat Presiden RI dalam rapat Panglima ALRI tanggal 17 Juni 1965 bab II no.27.

dipengaruhi oleh beberapa instrumennya. Perumusan suatu doktrin maritim merupakan "Pemikiran atau cara terbaik, mengenai suatu masalah dan menyatakan serta membimbing para penganutnya dalam hal ini rakyatnya, untuk menghadapi masalah maritim dan instrumen maritim didalamnya; doktrin telah diyakini kebenarannya oleh para penganutnya, diajarkan serta disebar luaskan namun pelaksanaannya harus didasarkan pada penalaran yang memadai kondisi yang berlaku pada saat itu". Doktrin maritim berisikan prinsip-prinsip dimana kekuatan maritim mengarahkan tindakan-tindakannya untuk mendukung cita-cita nasional, doktrin maritim diambil dari pengalaman-pengalaman keterlibatannya nasional maupun kancah internasional suatu negara.

Istilah maritim dapat berkaitan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut². Secara primer pengertiannya adalah sifat yang menggambarkan obyek atau aktifitas berkenaan dengan laut. Dalam konteks negara kepulauan negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut³. Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai corak ragam kondisi sosial budaya secara historis memiliki karakter bahari yang kuat. Saat ini telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan lingkungan strategis maritim, baik kawasan regional maupun internasional hal ini sangat mempengaruhi pola berpikir, cara bertindak dalam penentuan kebijakan politik suatu negara. Perubahan tersebut secara otomatis pula mempengaruhi penentuan strategi maritim masing-masing negara, yang merupakan aplikasi dari doktrin maritim yang dilaksanakan oleh setiap negara. Indonesia membutuhkan doktrin maritim sebagai pengoprasionalan pilihan strategi dan prioritas pembangunan ke depan⁴.

Dengan demikian negara maritim bisa dipahami sebagai negara yang dianggap peduli dan mampu dalam mengelola sumber daya kekayaan alam dari dasar hingga permukaan lautnya dan bahkan hingga lautan samudera, dalam

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ UNCLOS bab IV *archipelagic state*

⁴ <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/03/173575101/Indonesia-Membutuhkan-Doktrin-Maritim-Indonesia> diakses pada tanggal 16 Mei 2014 jam 14.00 WIB

berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, geopolitik serta aspek militer yang tercermin dalam *ocean policy*-nya. Dalam aspek ekonomi, Indonesia perlu membangun kembali visi ekonomi yang berbasis kelautan/maritim dan menempatkan Indonesia kembali kepada kejayaan bahari. Sumber daya perikanan, mineral, energi terbarukan, transportasi, pariwisata dan keanekaragaman hayati sangat melimpah serta menunggu untuk menjadi sumber positioning daya saing Indonesia dalam persaingan global. Upaya ini harus didukung dari faktor atau aspek lain dari geopolitik maritim antara lain demografi, geografi, politik dan militer. Oleh karena itu kita harus bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar yang tercermin dalam Doktrin Maritim Indonesia dalam *ocean policy*-nya yang dapat mewujudkan masa depan Indonesia sebagai negara yang memiliki paradigma kemaritiman dan akan berakibat kepada terjadinya transformasi besar besaran menuju kemakmurannya secara ekonomi, geopolitik dan militer.

Grand Maritime Strategy di Indonesia

Dengan diterimanya bahwa Negara kita adalah *Archipelagic state* hendaknya disyukuri dengan mengaplikasikannya ke dalam konsep pertahanan yang dibuatnya. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan negara maritim yang besar seperti Amerika Serikat, hirarki pengambilan keputusan di bidang keamanan dan pertahanan nasional dari yang tertinggi terus ke bawah adalah sebagai berikut: *national interest* sebagai *the fundamental goal of the nation* – *National Security Strategy* – *National Defense Strategy* – *National Military Strategy* – *National Strategy for Maritime Security* (khusus bidang maritim) – *Maritime Strategy* – *Naval Operations* – *Naval Tactics*⁵. Pada tahapan strata tersebut memiliki rumusan masing-masing yang dikeluarkan oleh masing masing instansi, yang mengatur secara jelas tentang tujuan yang akan dicapai, kewenangan serta tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.

Namun apabila melihat strata tersebut di Indonesia bahwa dari *National Interest*, *National Strategy*, *National Security sistem*, *National Security Policy*, *Defence Policy*, *Military Strategy*, *Doctrine (Indonesia Maritime strategy)* yang dituangkan dalam Eka Sasana Jaya TNI AL, di mana di dalamnya termasuk TNI AL melaksanakan *international role*-nya. Dari *Grand Strategy* atau *Maritime Strategy*

⁵ www.navy.mil/maritime/maritimestrategy

terdapat suatu jarak konsep dan kebijakan dalam pola pertahanan maritim Indonesia, bahwa kita tidak memiliki *maritime strategy* yang menurunkan *military maritime strategy*, namun langsung dituangkan ke dalam Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya

Apabila dilakukan konfirmasi konsepsi dan kebijakan maka merujuk pada urutan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa muncul *gap* atau jarak kebijakan antara konsep *grand strategy* yang telah dirumuskan oleh Indonesia melalui ragam kebijakan maritimnya dengan level kebijakan pertahanannya. Dari perbedaan konsep negara maju pertahanan maritimnya tersebut, kita telah kehilangan *National Strategy for Maritime Security* yang akan di jabarkan ke turunannya yaitu *Military Strategy, Naval Operation dan Naval Tactics*.

Strategi Pertahanan Maritim Indonesia

Pada tataran Kebijakan Nasional belum terlihat jabaran strategi pertahanan maritim Indonesia meskipun pada undang-undang dan kebijakan umum pertahanan negara telah dinyatakan bahwa upaya pertahanan harus memperhatikan kondisi geografis. Kita akan menghadapi *legal constrain* apabila menganalisis pendekatan *top-down* pada institusi institusi yang ada, seperti TNI AL, Polri, Bakorkamla yang sekarang telah menjadi Bakamla ataupun Coast Guard yang akan dibentuk, apabila dihadapkan pada tindak kriminal seperti *transnational crime* karena aturannya memang belum ada. Sesungguhnya sejak tahun 2005 TNI AL telah memformulasikan SPLN yang dilanjutkan dengan penyusunan SPMI. Namun konsep ini tidak didukung dengan komitmen pada tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan pertahanan negara maritim. Oleh karenanya kebijakan pertahanan nasional belum bisa dikatakan berpusat pada kerangka maritim. Secara konseptual dapat dinyatakan bahwa membangun strategi maritim dilakukan dengan memenuhi aspek *political will* sebagai modal dasar untuk mewujudkan pertahanan maritim yang tangguh (*ends*), *Sea Power* yang kuat (*means*), dan melaksanakan *sea control* dan *power projection ashore* (*ways*).

Dalam penyusunan suatu konsep strategi maritim negara manapun tidak ada yang sama, karena instrumen instrumen yang dimilikinya berbeda dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi geografik serta sistim politik negara bersangkutan. Demikian pula dengan Indonesia, yang memiliki kekhususan tersendiri ditinjau dari

segi geografi, hal tersebut dikarenakan *geography is the bone of strategy*. Pada pola bottom-up sebenarnya peran universal TNI AL seharusnya sudah sangat relevan dengan strategi pertahanan maritim karena institusi ini sebagai unsur pertahanan yang menjadi ujung tombak sebagai negara maritim. Dalam hal ini TNI AL berjalan pada dua strategi dasar yaitu Pengendalian Maritim dan Proyeksi kekuatan, dan ini pula bisa dijadikan level minor pada pertahanan maritim. Kajian terhadap Doktrin Eka Sasana Jaya berkelanjutan sangat relevan karena aplikasi dari doktrin ini mampu untuk menemukan pola Pertahanan Maritim Indonesia.

Doktrin Maritim Indonesia.

Doktrin Maritim Indonesia akan memuat penjelasan dan gambaran bagaimana negara seharusnya menyiapkan diri dalam masa damai maupun krisis khususnya pembangunan kekuatan maritim. Doktrin ini akan mengemukakan posisi TNI AL (sebagai salah satu kekuatan maritim) dalam TNI serta perannya dalam *Ocean Policy* pemerintah guna mensinergikan kekuatan maritim yang ada. Doktrin ini akan menggariskan bagaimana peran dan kontribusi TNI AL dalam TNI dan Negara secara menyeluruh dan bersama-sama instansi lain dalam melindungi kepentingan Nasional Indonesia. Disamping itu doktrin maritim juga menjelaskan bentuk peran serta aktif instansi maritim dalam membangun kekuatan maritim di Indonesia guna menuju negara maritim yang besar. Beberapa hal yang terkandung dalam doktrin maritim Indonesia nantinya antara lain:

a. Sejarah dan Lingkungan Maritim Indonesia yang akan menjabarkan faktor-faktor geografis, ekonomi dan sosial yang membatasi hubungan hubungan negara Indonesia dengan lingkungan maritimnya. Pada permasalahan ini menguraikan tentang bagaimana pentingnya laut sebagai urat nadi transportasi dunia yang sangat tergantung pada kondisi perairan Indonesia khususnya selat malaka. Bagian ini juga harus menjelaskan tentang cakupan keamanan nasional yang memiliki berbagai macam persoalan yang ada, serta menjelaskan tentang hubungan antara permasalahan yang berkaitan dengan maritim dan hukum nasional maupun Internasional. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lingkup wilayah kepentingan strategis Indonesia yang sangat luas. Hendaknya Negara menggantungkan pada laut dalam hal transportasi dan lain lain serta dapat mengambil banyak manfaat dari lingkungan maritim untuk hidup dan sumber sumber

daya mineral.

b. Kebijakan strategis yang menjabarkan sifat dasar kebijakan keamanan Indonesia terdiri dari lingkungan strategis Indonesia, kepentingan strategis yang ada, karakter strategis Indonesia dan pengaruh sejarah pada pandangan nasional serta kemampuan - kemampuan maritim dalam mencapai semua tujuan strategi pertahanan negara. Penekanan pada permasalahan ini adalah pentingnya pembangunan kekuatan dan kemampuan maritim dalam mewujudkan seluruh instrumen maritim mencapai tujuan strategi militer Indonesia disertai dengan standar yang harus dipenuhi dari kedua elemen tersebut (desain). TNI merupakan komponen utama dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia, karakteristik strategis Indonesia berarti kekuatan maritim yang handal adalah pokok bagi TNI khususnya TNI AL dalam melaksanakan keberhasilan tugasnya.

c. Konsep strategis maritim menganalisa tentang latar belakang pemikiran strategis maritim serta hubungan konsep konsep maritim saat ini dan masa mendatang. Penggunaan kekuatan laut dan pengendalian laut adalah dasar bagi negara maritim dalam mencapai tujuan tujuan strategis. Dalam permasalahan ini menunjukkan bahwa pengendalian laut juga kritis untuk proyeksi kekuatan secara efektif dalam lingkungan maritim, khususnya bila laut sedang digunakan sebagai sarana untuk pengangkutan dan mendukung kekuatan darat. Pengendalian laut, mencegah penggunaan laut oleh lawan dan proyeksi kekuatan adalah tugas tugas utama kekuatan maritim, sedangkan pengendalian laut, kemampuan untuk menggunakan laut dan mencegah penggunaannya oleh lawan adalah dasar bagi Indonesia dalam mencapai tujuan strategis pada masa konflik.

d. Konsep konsep operasional maritim menjelaskan tentang hubungan atau korelasi dan kerjasama antara kekuatan kekuatan darat, udara dan laut. Menetapkan sifat sifat dasar yang ada dalam penggelaran kekuatan maritim yaitu mobilitas, fleksibilitas dan fungsi asasi kapal perang, akses dan jangkauan dan kemampuan untuk melaksanakan operasi serta kapasitas kapal kapal untuk mengangkut kekuatan tempur yang sangat banyak pada jangkauan jarak yang jauh dan dapat memberikan banyak alternatif bagi para pembuat kebijakan tentang keputusan politik dan strategi serta kontijensi yang akan diambil nantinya. Menjelaskan pula tentang keterbatasan penggunaan kekuatan maritim dan cara

penggunaan kekuatan maritim yang dilengkapi dengan keunggulan kekuatan udara maupun kekuatan darat guna melaksanakan operasi-operasi utama angkatan laut pada masa krisis dan damai seperti *destroy the enemy fleet at sea or in its bases; conduct an amphibious landing on the opposed shore; destroy enemy coastal installations and facilities; attack enemy maritime trade; defend and protect friendly maritime trade; destroy enemy sea-based strategic nuclear forces; protect one's sea-based strategic nuclear forces; support friendly ground forces on the coast.*⁶ Pendekatan cara cara tersebut adalah penggunaan pendekatan kekuatan gabungan yang efektif yang akan dicapai dari laut. Kekuatan maritim memiliki karakteristik kemampuan yang unik pada konteks gabungan, dimana keuntungan kekuatan maritim meliputi kesiapan, akses, kekenyalan dan fungsi asasi.

e. Luas wilayah operasi maritim menjelaskan tentang cara cara yang dapat digunakan oleh kekuatan maritim, dimana peran kekuatan maritim pada dasarnya tergantung pada kemampuan tempur serta kemampuan kemampuan tersebut dapat memberikan dan mendukung kepentingan negara seperti halnya mengembangkan tujuan kebijakan luar maupun dalam negeri. Kemampuan bertempur dari kekuatan maritim memberikan dasar penggunaannya untuk misi misi yang lain dalam skala yang luas. Kekuatan maritim adalah instrumen yang berharga dalam penentuan kebijaksanaan politik dalam dan luar negeri. Kekuatan maritim memberikan kontribusi untuk usaha usaha diplomatik dan merupakan lambang yang khusus dari kedaulatan nasional dan kepentingan nasional. Kekuatan maritim memainkan peranan yang nyata dalam penegakkan hukum nasional maupun internasional. Kekuatan maritim dapat memberikan dukungan yang kuat dalam operasi operasi perdamaian.

f. Penunjang kekuatan maritim menjelaskan tentang bagaimana struktur dan organisasi TNI AL dalam mendukung kemampuannya untuk melatih, memelihara dan menunjang kekuatan yang efektif. Pada permasalahan ini juga jelaskan bagaimana hubungan yang efektif antara TNI AL dengan Industri Jasa Maritim Nasional dan juga dengan industri pertahanan lainnya dalam mencapai tujuan tujuannya. Selanjutnya pada bab ini pula dijelaskan kebutuhan akan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi hidrografi, ilmu oceanografi dan ilmu meteorology

⁶ Milan Vego (2009), *Operational Warfare at Sea: Theory and Practice*, London and New York: Routledge. p. 55.

dalam menunjang operasi operasi yang menggunakan kekuatan maritim. TNI AL diorganisir dan disusun untuk menghasilkan kemampuan tempur dan memiliki hubungan yang sangat efektif dengan industri jasa maritim merupakan unsur pokok dalam menghasilkan kemampuan. Dukungan logistik sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tugas sebagai atribut penting dari kekuatan maritim.

g. Instrumen pokok kekuatan tempur maritim menjelaskan bagaimana pengorganisasian seluruh kekuatan maritim dalam melaksanakan tugas serta bagaimana pengerahan seluruh komponen dalam satuan-satuan tugas untuk mencapai hasil yang maksimal dan efek yang terbesar. Pada permasalahan ini hendaknya ditunjukkan pula efektifitas dan fleksibilitas pengerahan kekuatan maritim dalam memberikan sumbangannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, instrumen tersebut baik dari militer maupun non militer. Kekuatan laut, darat dan udara semuanya mempunyai kontribusi untuk menunjang keberhasilan operasi maritim. Keberhasilan pencapaian tugas dalam lingkungan maritim tergantung kepada penciptaan dan pemeliharaan kesadaran ruang pertempuran. Kemampuan kemampuan tempur satuan satuan perorangan dimaksimumkan dengan cara dipadukan dengan unsur unsur lain.

h. Penyelenggaraan kampanye maritim menjelaskan tentang faktor faktor utama dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kampanye maritim, bagaimana penggunaan kekuatan maritim beserta instrumen maritim lainnya pada saat konflik sehingga akan tercapainya keberhasilan tugas. Pada pembahasan ini ditunjukkan bagaimana pentingnya lingkungan maritim beserta instrumennya untuk mencapai tujuan oleh seorang panglima. Perencanaan kampanye yang efektif membutuhkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara tujuan tujuan strategi, cara cara operasional dan sarana sarana taktis. Seluruh unsur kekuatan militer berkontribusi terhadap kampanye maritim, sebagaimana kekuatan maritim dapat berkontribusi terhadap kampanye darat dan kampanye udara. Beberapa tahapan khusus dalam melaksanakan suatu kampanye maritim antara lain: Pengenalan krisis, penyusunan kekuatan, penggelaran, operasi pengendalian laut, proyeksi kekuatan, dukungan untuk operasi pantai, rotasi dan penarikan kekuatan.

i. Kekuatan maritim Indonesia masa depan menggambarkan tantangan dan peluang peluang serta kendala yang akan dihadapi oleh kekuatan maritim di masa

depan. Pada permasalahan ini digambarkan pula implikasi potensial perkembangan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi dan yang menjadi kunci bagi bentuk bentuk dan peranan peranan kekuatan maritim, khususnya cara kekuatan maritim dapat meningkatkan kemampuannya untuk secara langsung mempengaruhi kejadian kejadian di darat. Pengembangan kekuatan maritim adalah suatu rangkaian kejadian (*continuum*) yang terus menerus terjadi. Perubahan teknologi dan sosial menimbulkan tantangan tantangan dan peluang peluang bagi kekuatan maritim. Kemampuan dalam bertempur harus diintegrasikan dengan instrumen kekuatan maritim lainnya ke seluruh dimensi.

Strategi Militer Maritim Indonesia

Dengan melihat tataran *Grand Strategy*, dalam sistem keamanan nasional yang berlaku di Indonesia, *grand strategy* akan diturunkan menjadi strategi militer gabungan (*joint military strategy*). Apabila, Strategi militer gabungan terbagi dalam tiga turunan sekaligus, di antaranya adalah strategi maritim. Dengan kata lain, posisi Strategi Militer Maritim Indonesia dalam tataran sistem keamanan sangat jelas, sehingga peran, misi dan tugas operasional TNI AL fondasinya juga sangat jelas. Doktrin maritim merupakan turunan dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan strategi adalah bentuk konkrit dari kandungan doktrin. Pemahaman demikian sudah sesuai dengan pemahaman universal mengenai hubungan antara doktrin dan strategi. Dengan demikian apabila kita telah memiliki Doktrin maritim Indonesia, kemudian diterbitkannya Strategi Militer Maritim Indonesia akan mencerminkan bahwa dokumen tersebut merupakan turunan dari doktrin yang dianut.

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan menguatnya isu *Maritime Security*, maka Indonesia akan melaksanakan transformasi dari status negara berkembang menuju negara maju. Strategi maritim yang akan disusun ini dipandang akan mampu mengamankan aspirasi kepentingan nasional Indonesai yang masih berstatus negara berkembang. Namun dalam 20 sd 30 tahun ke depan, bisa jadi status Indonesia telah meningkat menjadi negara maju sehingga aspirasinya mengalami perluasan dibandingkan saat ini. Perubahan itu akan diikuti pula strategi keamanan nasionalnya, termasuk pula strategi maritim.

Tujuan dari Strategi Militer Maritim adalah (i) *it is a design for relating ends to means*, (ii) *it is a significant tool in maritime planning because it provides the rationale for the application of maritime power flexibility over a range of contingencies and areas* dan (iii) *preparation for conflict is critical for ensuring that deterrence is effective*. Ends dari Strategi Militer Maritim adalah penangkalan, baik konvensional maupun strategis. Untuk menciptakan penangkalan itu, *means-nya* adalah *a three-dimensional, versatile, manned by our skilled human resources*⁷. Penyusunan suatu strategi maritim pasti didorong pula oleh *key determinants*. Begitu pula dengan Strategi Militer Maritim Indonesia, yang *key determinants-nya* adalah *an era of violent peace, growing sea dependence, Indonesia's maritime geography, supporting foreign policy, influencing operations ashore, the importance of joint operations, maritime domain awareness, role of air power, capability prioritization* dan *national maritime infrastructure*. Oleh karena itu dalam penyusunan Strategi Militer Maritim Indonesia hendaknya mengandung hal hal sebagai berikut:

a. Sejarah kemaritiman yang *up to date*. Menggambarkan tentang implikasi sejarah maritim yang ada Indonesia mulai dari evolusi penjajahan oleh Belanda sampai dengan beberapa operasi yang telah dilaksanakan oleh TNI AL. Lompatan lompatan sejarah kemaritiman sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan RI, Deklarasi Djuanda dan konsep wawasan nusantara yang selanjutnya dijelaskan dengan *lesson learned* yang bisa diambil dari berbagai operasi yang telah digelar dan digunakan sebagai pembandingan dalam merencanakan pembangunan TNI AL ke depan.

b. Menjelaskan tentang Geopolitik dan konstelasi kawasan Indonesia. Beberapa *choke point* di Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap kerawanan yang ada yang dapat memicu pergolakan keamanan nasional maupun internasional. Sebagai respon terhadap perkembangan lingkungan strategis di Samudera India dan sekitarnya, Indonesia hendaknya melakukan sejumlah inisiatif politik guna menata kawasan itu sesuai dengan *Indonesia political system*. Selanjutnya Faktor-faktor Geopolitik yang berkontribusi terhadap konflik yang sebagian besar dipicu oleh sengketa maritim dan teritorial. Isu keberagaman di wilayah perairan Indonesia

⁷ Integrated Headquarters of the Ministry of Defence (Navy), *Freedom to use the Seas: India's Maritime Military Strategy*

juga harus dijelaskan, baik dari segi populasi, sumber daya alam, ekonomi, terorisme, konflik dan ancaman lintas negara dan keragaman pada bencana alam. Khusus tentang yang terakhir, Kawasan Indonesia merupakan *locus* lebih dari 75 persen bencana alam dunia. Isu geopolitik lainnya adalah penilaian Terhadap Maritim Regional dan Kecenderungan-kecenderungan Angkatan Laut Ekstra Kawasan. Isu selanjutnya adalah pembangunan kekuatan Angkatan Laut China dan implikasi terhadap permasalahan Laut China Selatan, namun di sisi lain terdapat kecenderungan peningkatan kerjasama antar negara di kawasan regional untuk menanggulangi ancaman keamanan maritim.

c. Menjelaskan tentang perdagangan Maritim dan *Security of Energy*. Khususnya kawasan selat malaka dimana selat ini juga merupakan jalur energi yang dibawa dari Asia Barat menuju kawasan Asia Timur. Dalam Strategi Militer Maritim Indonesia nantinya harus, dibedakan definisi antara *energy security* dan *security of energy*. *Energy Security* adalah fungsi dari beragam faktor yang berinteraksi, termasuk sumber suplai sumberdaya energi, ketersediaan energi di masa kini dan mendatang pada harga yang bersaing, proyeksi kebutuhan energi berdasarkan pada tingkat konsumsi saat ini dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, rasio antara energi tradisional dan komersial dan lain sebagainya. Sedangkan *security of energy* mencakup sarana militer dan *quasi* militer yang diadopsi untuk menggarisbawahi kerawanan suplai energi. Isu *security of energy* lebih terkonsentrasi pada keselamatan dan keamanan aset-aset energi di wilayah *littoral*, garis perhubungan laut, sumber asal energi dan juga tempat penyimpanan dan jaringan distribusi. Dalam konteks kerjasama internasional, langkah langkah yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan MDA dengan negara lain antara lain: pengembangan kemampuan respon multinasional lewat latihan maritim bilateral dan multilateral untuk mencapai *interoperability*, dan meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*). Isu MDA yang canangkan oleh Amerika Serikat dalam ranah internasional untuk meningkatkan keamanan maritim direspon oleh banyak negara, sehingga tidak aneh bila hal tersebut tercantum pula dalam Strategi Militer Maritim Indonesia.

d. Menjelaskan dan membahas tentang *Maritime Domain Awareness* dengan permasalahan permasalahan perbatasan dengan negara tetangga baik batas laut

maupun batas darat. Untuk mengantisipasi peristiwa yang terjadi di wilayah NKRI yang dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia tercantum Skenario Yang Mungkin Bagi Penggunaan Kekuatan Militer Oleh Angkatan Laut Indonesia. Indonesia harus merancang skenario yaitu konflik dengan negara tetangga atau kekuatan ekstra kawasan, operasi bantuan kepada negara tetangga, operasi anti terorisme, menjamin *good order at sea*, pemeliharaan perdamaian, menjamin keselamatan dan keamanan SLOC di wilayah NKRI, melindungi diaspora Indonesia dan kepentingan Indonesia di luar negeri dan *humanitarian assistance and disaster relief* (HADR). Untuk memenuhi peran, misi dan tugas dari skenario yang dikembangkan, *maritime domain awareness* dipandang sebagai persyaratan awal yang mutlak. Menurut Strategi Militer Maritim Indonesia, *maritime domain awareness* bersifat esensial bagi pengambilan keputusan pada semua tingkatan operasi, baik strategis, operasional maupun taktis. Untuk menciptakan *maritime domain awareness*, Indonesia terus mengembangkan keberadaan dan kemampuan IMSS di setiap area yang telah ditentukan.

e. Menjelaskan tentang Penggunaan Strategi Di Masa Damai. Sebagaimana pada dokumen strategi lainnya, elemen pertama penggunaan kekuatan pada masa damai adalah penangkalan. Hal yang akan dijelaskan dalam penangkalan meliputi: *improvement in combat efficiency, ensuring forward presence, improving reach and sustainability* dan *information capability*. *Information capability* sendiri dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu intelijen, pengamatan dan jaringan dan membangun kemitraan. Selanjutnya dibahas tentang Strategi Untuk Peran Diplomatik. Indonesia harus tegas mengelompokkan peran diplomasi Angkatan Laut dalam dua bentuk, yaitu *maritime diplomacy* dan *maritime cooperation*. Strategi Untuk Peran Konstabulari dituangkan dalam dua bentuk, yaitu *Low Intensity Maritime Operations* (LIMO) dan *Maintaining Good Order at Sea*. Berikutnya adalah Strategi Untuk Peran *Benign* Peran *benign* pada TNI AL meliputi *humanitarian assistance and disaster relief* (HADR), *non-combatant evacuation operations*, hidrografi dan *building maritime consciousness* yang didukung oleh *communications strategic*.

f. Menjelaskan tentang Penggunaan Strategi Kekuatan Di Masa Konflik. Dalam permasalahan ini menguraikan tentang cara Angkatan Laut untuk mempengaruhi keluaran dari konflik, yaitu menggunakan metode *indirect operations* dan *direct*

operations. Seiring dengan perkembangan teknologi, Angkatan Laut Indonesia masa kini membutuhkan kemampuan untuk menggunakan secara maksimal kedua pendekatan untuk *to address* pertempuran darat dengan tujuan mempengaruhi peristiwa-peristiwa di darat. Karena perkembangan lingkungan strategis yang ditandai dengan perubahan spektrum konflik dan ancaman serta *revolution in military affairs*, Indonesia harus berani menyadari perlunya suatu strategi baru untuk menghadapi situasi tersebut, seperti strategi berjudul *A Maritime Military Strategy for Indonesia 2025 - 2050* yang akan meletakkan tugas-tugas bagi penggunaan kekuatan Angkatan Laut di masa konflik.

g. Menjelaskan tentang strategi Pembangunan Kekuatan. Pada permasalahan ini diuraikan tiga prinsip dasar pembangunan kekuatan laut Indonesia ke depan, yaitu konsep kemandirian, menghasilkan kesiapan tempur dan lompatan katak teknologi untuk menjembatani kesenjangan dengan negara maju dan akibat lanjutannya melalui investasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur uji coba dan kemitraan dengan perguruan tinggi. Dalam pembangunan kekuatan, Indonesia harus mengidentifikasi terlebih dahulu faktor pendorong bagi TNI AL. Terkait dengan hal itu, pembangunan kekuatan laut akan senantiasa dituntun oleh tiga faktor yaitu perencanaan jangka panjang dan alokasi anggaran dan pembangunan kompetisi inti (pada galangan kapal dan industri pertahanan). Untuk mencapai pembangunan kekuatan Angkatan Laut Indonesia, dibutuhkan investasi pada sejumlah teknologi masa depan. Dalam Strategi Militer Maritim Indonesia, hendaknya dicantumkan dalam bidang apa investasi teknologi apa yang akan ditetapkan.

Kesimpulan

Kepentingan nasional Indonesia harus dapat dicetuskan dalam *Indonesia political system* di kawasan. Untuk itu, dibutuhkan Status TNI AL yang jelas berstatus *blue water navy* yang mampu dikerahkan baik di dalam yurisdiksi nasional maupun *long range distance operation* dalam rangka mengamankan kepentingan nasional sebagai kekuatan penangkal dan pemukul. Sehingga dalam Strategi Militer Maritim Indonesia tergambar dengan jelas benang merah antara kepentingan nasional Indonesia dengan TNI AL sebagai salah satu instrumen kekuatan nasional dan sangat jelas termuat dalam sistem keamanan nasional Indonesia.

Pemerintah harus berani menjadikan sejarah kejayaan maritim Nusantara sebagai *lesson learned* yang bukan saja menyangkut tentang keberhasilan, tetapi juga kegagalan atau kekurangan yang terjadi. Hal ini sebagai pijakan dalam membangun Kekuatan Maritim Indonesia. Dalam menyusun Strategi Militer Maritim Indonesia tak luput juga dengan melihat kondisi di alam nyata yang kompleks, multidimensi dan saling terkait. Keterkaitan antara strategi dengan kondisi di alam nyata merupakan salah satu isu kritis dalam penyusunan strategi, karena kegagalan untuk menghubungkan keduanya akan mempengaruhi rumusan strategi menjadi sesuatu tidak bisa dioperasionalkan.

Pemerintah segera menyusun stratifikasi Doktrin Maritim Indonesia dalam *Ocean Policy* yang diaplikasikan dalam Undang Undang Maritim atau Undang Undang Kelautan sebagai dasar pembuatan Strategi Militer Maritim Indonesia, sehingga tidak akan terdapat gab kebijakan dari Tujuan Nasional – Sumber Daya Nasional – *Sea Power* – *Naval Power* – *Naval Operation*. Bila ini diterapkan maka pembangunan ***Indonesian Navy Vision 2025 – 2050*** sebagai elemen utama dalam kekuatan maritim (*Sea Power*) Indonesia dalam konteks pertahanan atau militer. Strategi Militer Maritim Indonesia nantinya merupakan suatu dokumen yang komprehensif yang merupakan jabaran dari strategi maritim Indonesia untuk mewujudkan aspirasi *Indonesia geopolitical system* di kawasan dan perairan lainnya di dunia.

Referensi:

- 1 Kuliah Perdana Presiden Soekarno di Lemhanas pada tanggal 31 Mei 1965 bab II hal 41.
- 2 Amanat Presiden RI dalam rapat Panglima ALRI tanggal 17 Juni 1965 bab II no.27.
- 3 *British Maritime Doctrine*.
- 4 *Australian Maritime Doctrine*.
- 5 UNCLOS 82
- 6 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 7 Milan Vego (2009), *Operational Warfare at Sea: Theory and Practice*, London and New York: Routledge. p. 55.
- 8 <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/03/173575101/Indonesia-Membutuhkan-Doktrin-Maritim-Indonesia>.
- 9 www.navy.mil/maritime/maritimestrategy.

10 Integrated Headquarters of the Ministry of Defence (Navy), *Freedom to use the Seas: India's Maritime Military Strategy*.